

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK  
JALANAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON  
(Studi Kasus di UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas  
Sosial Kabupaten Cirebon)**

**Lulu Gumanti<sup>1</sup>, Ipik Permana<sup>2</sup>, Moh Sutarjo<sup>3</sup>**

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini. Landasan dari pengimplementasian kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPK Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam penelitian ini terdapat empat identifikasi masalah yaitu: (1) Bagaimana implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum efektifnya implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? (3) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam imolementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? (4) Upaya-upaa apa saja yang dilakukan dalam implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? Adapun pendekatan penelitian yang digunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumen sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai, terbukti dari data hasil patrol PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial bahwa beberapa tahun terakhir ini jumlah anak jalanan justru semakin meningkat. Kedua dari segi sumber daya manusia dan finansialnya. Dinas sosial masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan ini belum maksimal. Ketiga, komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan pihak lain yang terlibat masih sangat kurang. Terbukti yang masih berperan aktif untuk membantu pembinaan anak jalanan hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) padahal masih sangat banyak LSM yang sebetulnya bisa diajak berkoordinasi supaya pembinaan anak jalanan bisa terimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

**Katakunci:** Implementasi Kebijakan, program pembinaan anak jalanan.

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to describe policy implementation fostering street children and factors which influence of this implementation policy. Base of the policy implementation program fostering street in UPT PPKS Cirebon district social department is Law no.23 of 2002. In this research there is four problem identification such as: (1) How the policy implementation program fostering street children in UPT PPKS Cirebon district social department? (2) What factors which influence not yet effective policy implementation fostering street children program in UPT PPKS Cirebon district social department? (3) What obstacles which faced in policy implementation fostering street*

*program in UPT PPKS Cirebon district social office? (4) What efforts are being made in policy implementation fostering street program in UPT PPKS Cirebon district social department? As for Research approach that used qualitative which is descriptive. the data collection technique is interview, observation and document study while data source that used originated from primary data and secondary data. The result of this research show that Policy implementation fostering street children arranged in local regulation No. 9 of 2014 not yet able effective applied because the aim of this policy not yet achieved, proven from the result of patrol PMKS (People with social welfare problems) Social department that recent years amount of street children increasingly increased the second one is in human resources terms and financially. Social service still experiencing shortages so implementation of fostering street children not maximal the third one, communication and coordination between department social with other parties which are involved still very less Proven which still play an active role for help fostering street children only from Pamong Praja police unit (Pol PP) even though still a lot of LSM which actually can invite coordinated so that fostering street children can be implemented with the best way.*

**Keywords:** Policy Implementation, The Fostering street children program

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terindah yang tidak tergantikan dalam sebuah keluarga. Setiap orang yang berumah tangga sangat menginginkan akan hadirnya seorang anak. Anak dapat memberikan hiburan tersendiri kepada orang tua dikala mereka penat dengan kegiatan sehari-hari. Tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan hal ini. Bisa jadi karena alasan medis, karena usia, atau karena memang belum dipercaya memiliki anak oleh Allah SWT.

Menurut UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “anak jalanan, anak terlantar, gelandangan, pengemis dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara”. Artinya

pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak jalanan. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dan kesejahteraan (*basic and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan bakat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Salah satu masalah sosial di Kabupaten Cirebon adalah anak jalanan. Cirebon dikenal sebagai salah satu daerah pemasok anak-anak jalanan, berdasarkan data terakhir yang di dapat dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Masalah-masalah yang diakibatkan Anak Jalanan di Kabupaten Cirebon ini cukup memprihatinkan dan menimbulkan kecemasan didalam lingkungan masyarakat. Seperti hal kurangnya pengawasan dan perlindungan orang tua dikarenakan faktor-faktor ekonomi yang kurang berkecukupan sehingga masa depan mereka terancam punah, yang seharusnya mereka mendapatkan bimbingan Ilmu pengetahuan dan pendidikan yang baik di sekolah namun sekarang mereka hanya bisa bermimpi karena faktor ekonomi yang membuat mereka harus bekerja, bahkan membantu memberikan penghasilan kepada kedua orang tuanya.

Anak-anak jalanan yang ada di Kabupaten Cirebon itu biasanya banyak ditemui di titik-titik wilayah tertentu, seperti misalnya di wilayah barat itu Arjawinangun, sedangkan wilayah tengahnya berada di Mundu, dan wilayah timur ada di Gebang sampai dengan Losari. Jika tidak segera diatasi maka kondisi anak-anak jalanan itu semakin banyak dan kemungkinan akan menghadapi keputusan akan mimpi menjadi seseorang yang sukses untuk membahagiakan orang tua dan cita-cita yang ada di dalam diri mereka, selain itu sangat mungkin kelak setelah dewasa mereka akan menjadi warga masyarakat yang akan melahirkan generasi yang semakin terpuruk dan setiap masalah yang menyentuh kehidupan anak dalam jumlah besar akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan di masa mendatang.

Robert Eystone dalam Agustino (2012:8) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya". *Van Meter dan Van Horn* dalam Budi Winarno (2005:102) merumuskan Implementasi Kebijakan Publik adalah sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lincoln dalam Moleong (2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan/observasi, dan pemanfaatan dokumen. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon**

Merebaknya fenomena tentang anak jalanan di Cirebon ini merupakan suatu persoalan yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka itu berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan yang jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif yang dilakukan oleh pemerintah kita sendiri. Padahal mereka itu adalah saudara kita. Mereka adalah amanah yang seharusnya bisa dilindungi oleh pemerintah, dan juga pemerintah dapat menjamin hak-haknya, sehingga mereka dapat tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Gambaran secara umum Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon merupakan program ini setelah dirumuskan anggarannya melalui APBD, dalam implementasinya

direalisasikan dengan mengadakan suatu program kegiatan tentang pemberian bantuan melalui bimbingan, pelatihan & keterampilan sebagai sasaran untuk kegiatan program tersebut. Pelayanan Sosial tentang pembinaan anak jalanan ini diberikan oleh pihak Dinas Sosial itu sendiri sesuai dengan anggaran yang ada.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belum Efektifnya Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon**

Dilihat dalam tataran teoritis, keberhasilan implementasi kebijakan (termasuk implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon) terdapat banyak faktor tentang Implementasi Kebijakan yang dapat menganalisis mengenai implementasi kebijakan ini, namun didalam penelitian ini faktor yang digunakan oleh penulis yaitu yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam Mulyadi, Deddy (2015:68) ditinjau dari 4 (empat) faktor atau variabel, diantaranya mengatakan bahwa:

#### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### 2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen.

#### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen,

kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

### **Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon**

1. Dalam Perda No. 2 Tahun 2008 pasal 6 menyebutkan pula bahwa pembinaan anak jalanan agar dapat berjalan secara efektif perlu dilakukan pencegahan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan. Selain itu, pihak Dinas Sosial harus lebih lagi dalam memberikan pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan.
2. Berkaitan dengan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pihak Dinas

Sosial harus merekrut pegawai-pegawai baru, atau bisa ditingkatkan lagi bekerjasama dengan mitra kerja yang lebih banyak agar program pembinaan anak jalanan ini tidak kekurangan SDM.

3. Berkaitan dengan minimnya anggaran, pihak Dinas Sosial Kabupaten Cirebon meminta bantuan kepada Dinas Sosial Provinsi atau Kementrian.

### **KESIMPULAN**

1. Implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sudah dilakukan secara efektif tetapi belum sepenuhnya maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali. Yang pertama dilihat dari proses pelaksanaan program pembinaan anak jalanan itu pihak dinas belum memberikan pembinaan yang kompleks. Kedua, yaitu dari Sumber Daya Manusia masih sangat kurang, sehingga program pembinaan anak jalanan itu prosesnya agak sedikit terhambat dikarenakan kekurangan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, yaitu minimnya anggaran yang diberikan

pemerintah untuk program pembinaan anak jalanan.

2. Komunikasi dan koordinasi Dinas Sosial dengan pihak yang sebetulnya dapat terlibat juga masih kurang, terbukti yang masih berperan aktif melakukan rehabilitasi sosial hanya di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon padahal UPT PPKS mengakui bahwa mereka kekurangan tempat untuk melakukan pembinaan karena tempat di UPT PPKS belum terlalu ketat penjagaannya sehingga anak-anak jalanan mudah kabur untuk pulang.
3. Dalam Perda No. 2 Tahun 2008 pasal 6 menyebutkan pula bahwa pembinaan anak jalanan agar dapat berjalan secara efektif perlu dilakukan pencegahan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan. Selain itu, pihak Dinas Sosial harus lebih lagi dalam memberikan pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA
- Moleong, Lexy, J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung: ALFABETA
- Mulyadi, Deddy, 2015 *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA, cv
- Said, Zainal Abidin, 2012. *Kebijakan Publik*. Penerbit Salemba Humanika: Jakarta.
- Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Subarsono, AG, 2013 *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dkk, \_\_\_\_\_. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.
- Winarno, Budi, 2014 *Kebijakan Publik (teori, proses dan studi kasus)*. Yogyakarta: PT. Buku Seru